



BAB 9 **PENUTUP**

Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia termasuk juga khususnya Provinsi Jambi. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program kegiatan baik sektoral maupun lintas bidang pembangunan. Selain itu, percepatan penanggulangan kemiskinan juga perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergitas antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat yang mendasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi 2016 - 2021 diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Jambi baik Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi/Lembaga dan Masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Setiap daerah mempunyai karakteristik dan masalah kemiskinan yang berbeda dengan daerah lainnya, oleh sebab itu dokumen rencana strategis di daerah perlu disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan pada masing-masing daerah.

Dokumen ini berlaku sebagai acuan dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dalam jangka pendek dan menengah, serta secara dinamis dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan lingkungan. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi pembawa arah bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.